

PENDIDIKAN SEBAGAI AGEN PENCIPTA MANUSIA PEKERJA: SUATU KRITIK LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM PANDANGAN KARL MARX

Oleh:

Gede Agus Siswadi

STAHN Jawa Dwipa Klaten Jawa Tengah, Program Doktor Ilmu Filsafat UGM

Email: philosiswadi@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Naskah Masuk : 6 Januari 2025

Naskah Direvisi : 13 Februari 2025

Naskah Disetujui : 26 Februari 2025

Tersedia Online : 13 Maret 2025

Keywords:

Education, Capitalism,

Commercialization, Karl Marx

Kata Kunci:

Pendidikan, Kapitalisme,

Komersialisasi, Karl Marx



This is an open access article under the CC BY. SA

Copyright © 2025 by Author. Published by Samsara Publishing House

ABSTRACT

A discourse that education is a right for every human being has long been echoed. Even education is said to be the most appropriate way to change civilization. However, the question is what kind of education is needed by humans? Because at this time to access quality education for everyone is something that is difficult to obtain. Schools have been formed as expensive and elite institutions, so that the discourse of education being the right of every human being in social phenomena has collapsed. This is what became the center of attention of Karl Marx's thoughts, which also responded to issues regarding education. Thus, the purpose of this study is to explain the basis of Marx's argument about education, as well as explain things related to Marx's criticism of educational issues. The method used in this study is a qualitative method with a philosophical hermeneutic approach. The results of this study indicate that Marx departed from Hegel's dialectical thinking by initiating the concept of historical dialectical materialism. Furthermore, Marx explained that education is currently trapped in capitalism so this is what causes education to be commercialized. Educational institutions according to Marx have also succeeded in forming social classes that are not very egalitarian and tend to be discriminatory. Educational institutions have also caused students to become alienated. And the culture that is grown in education is a culture of obedience and fails to prepare students who are able to "produce knowledge", because education only prepares students to be able to work in the industrial world.

ABSTRAK

Sebuah wacana bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap manusia telah lama dikumandangkan. Bahkan pendidikan dikatakan sebagai cara yang paling tepat untuk dapat merubah peradaban. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah pendidikan seperti apa yang dibutuhkan oleh manusia? Lantaran saat ini untuk mengakses pendidikan yang bermutu bagi setiap orang menjadi suatu

yang sulit untuk diperoleh. Sekolah telah terbentuk sebagai lembaga yang mahal dan elit, sehingga wacana dari pendidikan yang menjadi hak bagi setiap manusia dalam fenomena sosial menjadi runtuh. Hal inilah yang menjadi pusat perhatian dari pemikiran Karl Marx yang turut menanggapi isu-isu tentang pendidikan. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dasar dari argumentasi Marx tentang pendidikan, serta menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kritikan dari Marx mengenai isu-isu pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutik filosofis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Marx berangkat dari pemikiran dialektika Hegel dengan menggagas konsep materialisme dialektis historis. Selanjutnya, Marx menjelaskan bahwa pendidikan saat ini terjebak dalam kapitalisme sehingga hal ini yang menyebabkan pendidikan dikomersialisasikan. Lembaga pendidikan menurut Marx juga telah berhasil untuk membentuk kelas-kelas sosial yang sangat tidak egaliter dan cenderung diskriminatif. Lembaga pendidikan juga telah menyebabkan anak didik menjadi teralienasi. Serta budaya yang ditumbuhkan di dalam pendidikan adalah budaya kepatuhan dan gagal untuk menyiapkan anak didik yang mampu untuk “memproduksi ilmu”, karena pendidikan hanya menyiapkan anak didik untuk mampu bekerja di dalam dunia industri.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan berhubungan dengan proses pengembangan dan juga perubahan dari kelakuan anak didik. Oleh karenanya, pendidikan sangat erat dengan upaya transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan juga keterampilan (Jalaluddin & Idi, 2002). Pada dasarnya pendidikan adalah proses belajar dan mengajar pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian perkembangan masyarakat yang modern menuntut bahwa sebagian dari tugas pendidikan dijalankan oleh institusi yang disebut sekolah. Artinya, proses pendidikan dipercayakan pada instansi sekolah untuk menyusun program-program pembelajaran yang akan diberikan kepada anak didik. Sehingga lambat laun, *mindset* masyarakat akan bergantung pada *power* dari sekolah yang memberikan stigma pada setiap masyarakat bahwasanya orang yang belajar adalah orang yang bersekolah. Orang yang memiliki masa depan yang baik adalah orang yang bersekolah (Siswadi, 2022b).

Oleh karenanya, implikasi sosiologisnya bahwasanya sekolah telah terlanjur dianggap sebagai tempat satu-satunya dalam memperoleh wawasan dan juga ilmu pengetahuan, serta penunjang masa depan yang cerah. Sekolah juga telah diandalkan

sebagai tempat yang efektif dalam meningkatkan strata sosial di masyarakat. Melalui sekolah, orang juga berharap akan dapat memperbaiki kehidupannya baik secara ekonomi, budaya maupun posisi dalam hierarki sosial. Pendidikan di sekolah juga diorientasikan pada persiapan anak didik dalam memasuki dunia kemasyarakatan. Bahkan, di dalam benak masyarakat pendidikan yang dilakukan di sekolah ini memiliki mitos bahwasanya semua orang memiliki kesempatan yang sama di dalam pendidikan, dan hal ini seolah-olah sekolah membuka kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat (Siswadi, 2023a).

Pendidikan yang seharusnya menjadi proses untuk memanusiakan manusia, nampaknya belum menghadirkan upaya yang demikian. Pendidikan yang memanusiakan manusia ini sebagai proses untuk menghantarkan manusia menemukan kesempurnaannya melalui kesadaran terkait dengan kesatuan dimensi kemanusiaan yakni tubuh, jiwa, pikiran dan juga perasaan. Artinya, pendidikan yang memanusiakan merupakan pendidikan yang mengantarkan manusia pada perkembangan yang signifikan dalam menemukan, mengembangkan, dan menunjukkan kesempurnaan kemanusiaannya (Siswadi, 2024b). Segala muatan pembelajaran ataupun informasi yang diberikan di dalam sekolah hendaknya sebagai suatu upaya yang menantang tubuh, pikiran, jiwa dan perasaan dalam menemukan dinamikanya yang seimbang (Santo, 2008).

Pendidikan yang dilaksanakan pada masa kini juga nampaknya lebih berorientasi pada kehidupan di masa depan. Artinya, orang-orang memahami lembaga sekolah sebagai jalan untuk lebih dekat dengan perolehan suatu pekerjaan. Sehingga, sekolah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi orang-orang yang ingin untuk meningkatkan kemampuannya serta mampu bersaing dalam dunia kerja (Siswadi, 2023c). Hal ini juga telah menjadi suatu kelanggengan pada sekolah sebagai suatu lembaga yang mampu memberikan justifikasi terkait dengan kualitas seseorang dengan memberikan predikat kelulusan serta berbagai deretan angka yang menjadi tolok ukur pada penilaian individu dalam proses belajarnya. Dan pada konteks selanjutnya, lembaran justifikasi yang diberikan oleh sekolah kepada setiap anak didik berupa ijazah tersebut akan menjadi sebuah tiket masuk pada dunia kerja yang menuntut keprofesionalan dengan dibuktikan berupa sebuah tiket yakni ijazah yang diperoleh pada lembaga pendidikan (Siswadi, 2022b).

Hal inilah yang menjadi sorotan Karl Marx bahwa lembaga pendidikan sebagai agen dalam membentuk manusia yang siap untuk bekerja. Terlebih lagi dalam kelas-kelas sosial yang dirumuskan oleh Marx, bagi kaum-kaum buruh ataupun golongan masyarakat menengah ke bawah tidak akan terlalu memikirkan anak-anaknya belajar tentang hal apa di sekolah, tetapi orang tuanya akan selalu memikirkan anaknya agar dapat ijazah ketika sekolah dan bisa melamar pekerjaan dengan ijazah yang dimilikinya. Berbeda dengan kaum-kaum borjuis yang memiliki ruang dalam mengakses pendidikan yang lebih layak dengan berbagai fasilitas pendukungnya. Ketimpangan kelas sosial yang digambarkan oleh Marx ini tentunya akan berpengaruh pada dunia pendidikan.

Pendidikan yang digambarkan oleh Marx juga semata-mata sebagai lembaga yang mengabdikan kepada golongan industri atau para kapitalis. Artinya, segala daya upaya yang dibangun dalam pendidikan senantiasa memiliki garis lurus dengan kebutuhan pasar industri. Tidak hanya muatan pelajaran yang dirancang di dalam kurikulum yang juga mengikuti kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia industri, namun juga menyentuh pada keterampilan-keterampilan yang diberikan kepada anak didik juga senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan berbagai kritik dari Karl Marx terhadap lembaga pendidikan dengan fokus kepada pendidikan sebagai agen pencipta manusia pekerja yang telah dilontarkan oleh Karl Marx. Sehingga, melalui penelitian ini diharapkan untuk mampu memberikan sumbangsih pemikiran serta membongkar struktur-struktur pendidikan yang dehumanisasi atau mengabaikan prinsip-prinsip humanisasi di dalam lembaga pendidikan.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutik filosofis. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Bakker & Zubair, 2007) bahwasanya hermeneutik filosofis berarti sebuah pendekatan filsafati yang berupaya untuk menelusuri makna dengan mendalam melalui kajian filosofis. Artinya, sebuah makna dalam penelitian diperoleh melalui rangkaian reflektif terhadap fenomena dengan dihadapkan pada objek formal yang sesuai dengan fenomena penelitian yang ada. Oleh karenanya objek material dalam penelitian ini adalah fenomena pendidikan yang lebih spesifik pada dehumanisasi dalam pendidikan, sedangkan objek formal dalam penelitian ini adalah pandangan dari Karl Marx tentang pendidikan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), seperti yang dijelaskan oleh (Zed, 2004) bahwasanya *library research* merujuk pada sebuah upaya untuk memperoleh data melalui penelusuran, pembacaan, pencatatan dari beberapa pustaka ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, artikel, skripsi, ataupun karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansinya dengan penelitian yang dikaji. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti pola analisis data dari Miles dan Huberman yakni mulai dari data koleksi, reduksi data, display data, dan terakhir adalah penyimpulan data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Biografi Karl Marx dan Pokok-Pokok Pemikirannya

Karl Marx dilahirkan di Trier, Prussia, Jerman pada tanggal 5 Mei 1818. Ayah dari Marx berprofesi sebagai seorang pengacara yang terkemuka pada zamannya. Hal ini juga yang mengakibatkan keluarga Marx senantiasa memiliki kehidupan pada kategori kelas menengah. Kedua orang tuanya pada mulanya berasal dari keluarga rabbi, tetapi karena alasan-alasan bisnis, kedua orang tuanya tersebut memutuskan

untuk berpindah agama ke Lutheranisme ketika Karl Marx masih sangatlah muda. Marx memulai perjalanan intelektualnya dengan memulai studi hukum di Universitas Bonn pada tahun 1835, namun atas perintah ayahnya, setahun setelah menjalankan perkuliahan di Universitas Bonn, Marx pun pindah ke Universitas Berlin. Pada universitas inilah Marx memulai untuk melirik bidang filsafat dan memutuskan untuk beralih dari hukum ke filsafat. Karena aktivitas kesehariannya fokus pada bidang filsafat dan mulai serius untuk mengenal bidang-bidang filsafat, Marx kemudian mulai terpengaruh oleh gagasan-gagasan Hegel dan para penafsir dari pemikiran Hegel seperti Bruno Bauer dan juga Ludwig Andreas Feuerbach. Marx kemudian memperoleh gelar doktor dengan disertasinya tentang perbedaan-perbedaan antara ide-ide Demokritos dan Epicuros pada tahun 1841. Namun karena pada saat itu Marx belum bisa untuk menjadi dosen, maka Marx memutuskan untuk menjadi seorang wartawan untuk mencari nafkah (Shodiq, 2018).

Mengawali profesinya sebagai seorang wartawan mengantarkan Marx untuk aktif menulis di sebuah koran yang liberal dan juga radikal, bahkan ketika Marx bekerja hampir sepuluh bulan, ia kemudian diangkat sebagai kepala editornya. Namun, dalam perjalanannya koran tersebut dipaksa untuk tidak beroperasi lagi oleh pemerintah setempat karena pendirian-pendirian politisnya. Akan tetapi, esai-esai yang telah diterbitkan pada periode-periode sebelumnya telah menjadi tuntunan bagi Marx yang akan membuatnya menjadi seorang pemikir, kritikus, dan juga filsuf sepanjang hidupnya. Pandangan-pandangan tersebut telah didasari secara radikal dengan prinsip-prinsip demokratis, humanisme, bahkan Marx juga menolak keabstrakan filsafat Hegel serta menolak para aktivis yang mendesak hal yang oleh Marx dianggap sebagai tindakan politis pengatur (Bahari, 2010).

Marx menikah pada tahun 1843, namun tidak lama kemudian Marx terpaksa meninggalkan Jerman untuk mencari suasana yang lebih liberal di Paris. Di sana kemudian Marx terus berkutat dengan ide-ide dari Hegel maupun para pendukungnya. Di samping itu Marx juga menjumpai dua kumpulan ide yang baru yakni sosialisme Prancis dan juga ekonomi politis Inggris. Marx kemudian berupaya untuk menggabungkan Hegelianisme, sosialisme, dan juga ekonomi politis yang kemudian melahirkan orientasi intelektual yang unik. Selain itu, Marx juga berjumpa dengan teman yang kemudian menjadi sahabat seumur hidupnya yakni Friedrich Engels. Engels merupakan seorang putra dari pemilik pabrik tekstil. Situasi kehidupannya kemudian menjadikan Engels sebagai seorang sosialis yang kritis terhadap kondisi-kondisi yang dihadapi oleh kelas pekerja. Perasaan iba dari melihat kesengsaraan kelas pekerja ini yang kemudian mengantarkan seorang Karl Marx untuk menggagas ide-ide cemerlangnya tentang keadaan seorang pekerja ataupun seorang buruh (Shodiq, 2018).

Pengaruh pemikiran dari Marx memang tidak bisa diragukan lagi dalam sejarah perjalanan dunia. Marx bahkan telah mampu untuk menghadirkan dan juga merangsang dari perubahan cara berpikir sekaligus mengubah cara manusia bertindak. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Marx bahwa “para filsuf

hanya menginterpretasikan dunia dalam berbagai cara, masalahnya adalah bagaimana mengubah dunia". Hal inilah yang kemudian membedakan Marx dengan para pemikir lainnya, karena filsafat Marx lebih diletakkan pada upaya untuk mengubah dunia, bahkan lebih daripada itu yakni sebagai ideologi. Oleh karenanya, pemikiran yang ditawarkan oleh Karl Marx mempunyai dampak yang sangat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, sejarah pemikiran modern, kebudayaan, seni, filsafat, bahkan juga ke pendidikan.

Beranjak dari pemikiran Hegel tentang dialektika, Marx kemudian menyusun kembali bangunan pemikiran lantaran tidak puas terhadap dialektika Hegel yang terlalu berpusat pada ide/roh. Hal ini bagi Marx terlalu abstrak dan juga belum menyentuh realitas konkret. Pandangan tersebut juga tidak sesuai dengan keinginan dari Karl Marx bahwasanya filsafat harus mampu mengubah cara orang bertindak. Marx juga memandang bahwa filsafat tidak boleh statis, namun harus senantiasa aktif dalam membuat perubahan-perubahan karena yang terpenting adalah perbuatan dan materi, bukan ide-ide. Manusia juga selalu terkait dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan yang melahirkan sejarah. Di sinilah posisi Marx yang membalik dialektika ide Hegel menjadi dialektika materi. Apabila Hegel menyatakan bahwa kesadaranlah yang menentukan realitas, maka Marx mendekonstruksinya dengan mengatakan bahwa praksis materiallah yang menentukan kesadaran (Shodiq, 2018).

Materialisme merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwasanya segala sesuatu dapat dijelaskan melalui hukum yang mengatur materi dan gerak. Materialisme ini berpendapat bahwa materi merupakan ukuran segalanya, melalui paradigma materi ini segala sesuatu dapat dijelaskan. Oleh karenanya, materialisme Marx merupakan materialisme dialektis yang meyakini kebudayaan akan mengalami kemajuan. Jika dalam Hegel menyebutkan bahwa realisasi total roh absolut, maka dalam Marx kemajuan kualitatif tersebut berupa masyarakat tanpa kelas (masyarakat yang tidak lagi didominasi oleh materi). Dari pemikiran ini, Marx merumuskan berbagai kritikan-kritikan terhadap kapitalisme yang menyebabkan masyarakat menjadi terkotak-kotakkan dengan kelas-kelas sosial yang sangat tidak egaliter. Marx juga menjelaskan berbagai bentuk alienasi dari kelas-kelas tertentu sebagai akibat dari kelas-kelas sosial tersebut. Demikian juga pada ranah pendidikan Marx juga mengkritik kapitalisme dan juga komersialisasi pendidikan serta berbagai sorotan tajam dari Marx yang cenderung ingin membongkar hal-hal atau isu-isu pendidikan yang telah lama menjadi sesuatu hal yang langgeng dalam pandangan masyarakat.

3.2 Kapitalisme dan Komersialisasi Pendidikan

Pada prinsipnya konsep pendidikan yang diperuntukkan bagi semua golongan (*education for all*) merupakan sebuah konsep yang mengandung pemenuhan rasa egaliter (keadilan) bagi masyarakat dalam pendidikan, karena mengingat bahwasanya pendidikan sejatinya merupakan sebuah hak dasar yang mutlak harus diperoleh oleh semua orang tanpa kecuali (Siswadi, 2024c). Hak bagi semua orang untuk memperoleh pendidikan setinggi dan sejauh kemampuan dari setiap individu. Dan

tentunya hal ini mengisyaratkan bahwasanya tidak diperbolehkan apabila sebuah pendidikan hanya dinikmati bagi segelintir ataupun sekelompok orang atau elit tertentu.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya sebuah fenomena di masyarakat menunjukkan kalau pendidikan seringkali menjadi beban yang berat. Bahkan tidak sedikit juga anak-anak yang tidak memiliki *privilege* untuk dapat mencukupi akses masuk sekolah dengan biaya yang cukup tinggi tersebut harus menerima keadaan tersebut karena ketiadaan biaya (Siswadi, 2023b). Dalam hal ini, tidaklah berlebihan apabila mengatakan bahwa pendidikan telah menjadi barang mewah dan sangat mahal sehingga tidak dapat dijangkau dengan kemampuan uang yang dimiliki. Bahkan tidaklah mengherankan juga bahwa seringkali di tahun ajaran baru pasti menjumpai berita di media massa ataupun juga di televisi bahwa para orang tua mengeluhkan tentang mahalnya biaya untuk dapat menyekolahkan anaknya. Bahkan tidak jarang juga para orang tua demi melihat anaknya untuk mampu bersekolah bahkan rela untuk melepaskan barang berharganya untuk dijual ataupun digadaikan agar dapat membayarkan biaya sekolah anaknya.

Oleh karenanya, budaya kapitalis telah bercokol pada dunia pendidikan. Sehingga, dunia pendidikan tidak luput dari renggutan kekejaman kapitalisme yang cenderung hanya bicara tentang uang dan juga keuntungan materiil. Pendidikan juga cenderung dikuasai oleh para pemilik uang, dalam artian orang kaya menjadi kelompok elit dalam dunia pendidikan (Siswadi, 2022a). Sementara kelompok miskin menjadi kelompok yang termarginalkan yang hanya menjadi penonton, tetapi tidak dapat memasuki panggung yang namanya pendidikan. Oleh karenanya, lembaga pendidikan telah sedari awal memiliki sifat yang cenderung diskriminatif, yakni telah membagi masyarakat berdasarkan kelas-kelas sosial tertentu. Akses pendidikan hanya dinikmati bagi kalangan elit yang dapat menjangkau pendidikan dengan biaya yang tinggi, sedangkan kaum-kaum menengah ke bawah tidak dapat berbuat apa-apa, karena tidak dapat mengakses pendidikan dengan biaya yang sudah menjadi ketentuan dari masing-masing lembaga pendidikan (Freire, 2001).

Makna pendidikan di masyarakat juga telah direduksi serta disederhanakan hanya dimaknai sebagai sekolah. Bahkan hak belajar bagi setiap individu juga dipersempit menjadi kewajiban sekolah (Illich, 1971). Pandangan yang seperti ini hanyalah pandangan yang sifatnya reduksionis terhadap pendidikan. Pendidikan juga seringkali dimaknai sangat sederhana menjadi sebuah institusi pendidikan yang bernama sekolah. Padahal sekolah hanyalah salah satu dari sederatan institusi pendidikan tempat anak manusia dalam menjalankan proses belajar dalam hidupnya. Karena sesungguhnya secara terminologi pendidikan berasal dari bahasa latin yakni *educare* yang berarti “menarik ke luar dari”. Sehingga pendidikan adalah sebuah aksi untuk membawa anak didik untuk ke luar dari kondisi yang tidak merdeka, tidak dewasa, dan tidak tergantung menuju pada situasi yang merdeka, dewasa dan dapat menentukan sendiri (mandiri) dan bertanggung jawab. Tentu saja konsep ini akan

tercapai apabila belajar sebagai inti dari pendidikan tidak dibatasi dalam lingkup sempit sebagai aktivitas sekolah.

Sekolah juga sering didefinisikan sebagai lembaga pendidikan yang menghendaki kehadiran penuh dari kelompok-kelompok dengan umur tertentu serta dalam ruang-ruang kelas yang dipimpin oleh guru untuk mempelajari kurikulum-kurikulum yang bertingkat (Siswadi, 2022b). Sehingga implikasi sosiologisnya sebagaimana yang ada dalam pikiran dan bayangan orang ketika mendengar kata sekolah, maka akan terbayang suatu tempat di mana orang-orang menghabiskan sebagian masa hidupnya untuk belajar atau mengkaji sesuatu. Sekolah sebagai institusi belajar sesungguhnya hanyalah salah satu dari sekian banyak tempat belajar yang tersedia di alam ini. Oleh karenanya, saat ini masyarakat begitu sangat percaya dengan fungsi sekolah dan juga peran sekolah. Bahkan duniapun telah menjadikan sekolah sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas dan kemajuan dari suatu bangsa. Angka dari masyarakat yang bersekolah telah menjadi salah satu indikator dari kualitas pembangunan suatu negara. Sehingga, tidaklah jarang untuk melihat sebuah kampanye yang menggemakan “ayo sekolah”. Kampanye ini tentunya telah berhasil menyeret manusia untuk berlomba-lomba, berkompetisi untuk memasuki dunia sekolah. Sekolah sampai pada jenjang yang tinggi telah menjadi cita-cita dan harapan semua orang, apapun akan dilakukan demi meraih cita-cita bersekolah. Dan hal yang menjadi pertanyaan di sini adalah kenapa tidak diajak “ayo belajar?” padahal sejatinya inti pendidikan adalah belajar (*learning*).

Hal ini juga akan memunculkan paradigma-paradigma yang baru di dalam masyarakat. Sehingga di tengah-tengah masyarakat akan muncul “mazab sekolahan” dan “mazab ijazah”. Sekolah dengan ijazahnya ini telah menjadi barang mewah dan penentu keberhasilan manusia. Ijazah juga telah menjadi tujuan orang-orang untuk bersekolah, dengan ijazah manusia beranggapan bahwa Sebagian terbesar masa depannya telah dapat diraih, ditemukan bahkan ditentukan. Terlalu percayanya dengan sekolah hingga manusia telah rela menghabiskan Sebagian terbesar waktu, kekayaan, dan segala kemampuannya untuk bersekolah. Selain itu, sekolah yang dipandang sebagai satu-satunya lembaga untuk belajar telah berkembang di hampir seluruh pelosok negeri. Perhatian terhadap perkembangan sekolah saat ini tidak hanya oleh pemerintah, tetapi para praktisi pendidikan swasta pun tidak kalah antusiasnya berperan serta mendirikan sekolah. Di mana-mana berdiri yayasan yang secara khusus aktivitasnya mengelola lembaga pendidikan (sekolah) (Freire, 1984).

Sekilas perkembangan pendidikan persekolahan memang terasa menggembirakan, sebab pendidikan yang hakikatnya memiliki tujuan manusiawi bagi pengembangan sumber daya manusia telah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Namun pertanyaannya, apakah benar pendidikan yang selama ini telah dilaksanakan benar-benar berdiri pada jalur yang tepat sesuai dengan misi pendirian bangsa ini, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa? Atau terdapat selubung-selubung kapitalis dan atau komersialisasi di dalam wajah pendidikan yang konon diperuntukkan bagi seluruh masyarakat? Hal inilah yang telah banyak digugat oleh

para pemerhati pendidikan yang menjelaskan bahwa sekolah yang semestinya berwajah humanis, ternyata telah menjelma dengan wajah yang cenderung kapitalis, elitis, materialis, dan melahirkan produk manusia yang bersikap serba instan. Dan yang jelas sekolah hanya dapat dinikmati oleh kelompok kelas tertentu dalam masyarakat, sehingga kesan sekolah yang konon terbuka untuk umum sesungguhnya bersifat semu dan palsu. Sekolah sesungguhnya hanya terbuka pada mereka pemilik modal.

Praktik pendidikan yang dirasakan saat ini, disadari atau tidak telah terjebak dalam dunia serba kapitalisme (Allman, 2001). Penyelenggaraan pendidikan dirangkaikan dengan sebuah ajang kontestasi yakni bagaimana sekolah dapat menjual kharisma dan juga kebanggaan sebesar-besarnya sehingga banyak calon peserta didiknya menjadi terbuai serta membelinya. Sehingga penilaian atas kharisma dan juga kebanggaan dari sebuah sekolah sifatnya lebih cenderung ke *capital*. Hal ini juga yang berimplikasi pada anggapan bahwa pendidikan dengan biaya yang relatif mahal tersebut dianggap sesuatu yang pantas, layak dan dibenarkan. Oleh karenanya mahalnnya biaya pendidikan di sekolah-sekolah (termasuk sekolah negeri) menjadi hal yang menakutkan. Dan mungkin, hal yang dipikirkan tentang sekolah ataupun ketika mengawali ingin masuk sekolah maka pertanyaan awalnya adalah “berapa biayanya?”.

Pendidikan dengan biaya yang relatif mahal akan menjauhkan akses layanan pendidikan yang bermutu dari jangkauan kaum miskin. Hal ini tentu akan berimplikasi pada lahirnya sebuah kelas-kelas sosial dan juga ketidakadilan sosial. Padahal telah jelas dimandatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Keadaan yang demikian akan berimplikasi pada kemampuan dari kaum miskin (yang sesungguhnya mereka pun tidak berkeinginan untuk menjadi miskin) sangat sulit untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaannya sebagai seseorang yang bermartabat. Situasi ini juga semakin parah karena penilaian terhadap kemampuan intelektual dari anak didik juga sangat berorientasi pada kapital (*capital oriented*). Sebuah deretan angka seringkali diciptakan untuk menentukan status intelektual dan kelulusan. Celakanya, hal ini yang dijadikan sebagai legitimasi dari sekolah untuk menentukan biaya yang mahal tersebut.

Lembaga pendidikan saat ini sudah tidak lagi menjadi media transformasi nilai dan instrumen dalam memanusiakan manusia (humanisasi), melainkan telah menjelma menjadi lahan basah bagi para pengelola pendidikan (Siswadi, 2024a). Dan dalam kondisi yang demikian, lembaga pendidikan tidak ubahnya seperti korporasi yang hanya memikirkan keuntungan semata. Oleh karenanya, tidaklah heran apabila semakin hari biaya pendidikan semakin mahal. Di era yang serba modern ini hampir tidak mungkin untuk menemukan biaya pendidikan yang bisa dijangkau oleh orang yang pendapatannya menengah ke bawah (miskin), khususnya bagi pendidikan yang bermutu. Hal ini dapat dipastikan semakin bagus fasilitas, maka akan semakin besar juga uang yang mesti dikeluarkan oleh peserta didik (Illich, 1971).

Apabila ditelusuri lebih lanjut, terdapat beragam faktor yang menyebabkan pendidikan yang dilaksanakan saat ini kurang berpihak pada masyarakat yang miskin dan membuatnya terjebak pada arus komersialisasi dan kapitalisme. Salah satunya adalah mental pragmatisme yang telah menjadi dasar dari setiap kebijakan dalam pendidikan (Topan, 2021). Apabila sikap pragmatis ini dihadirkan dalam paradigma berfikir dari masyarakat, maka akan dengan sendirinya menciptakan tatanan sosial budaya dan juga politik yang pragmatis. Dalam kesadaran masyarakat yang pragmatis, uang akan melandasi seluruh sikap maupun tindakannya. Ringkasnya, sikap dan tindakan di masyarakat akan dikatakan benar ataupun berguna apabila secara langsung menghasilkan uang atau materi. Oleh karenanya ukuran tentang kesuksesan, martabat ataupun eksistensi dari seseorang akan sangat tergantung dari jumlah uang yang dimilikinya. Dunia pendidikan saat ini tidak sanggup menghindarkan diri dari logika tersebut. Sehingga, hampir semua kebijakan pengelolaan pendidikan tidak akan luput dari pertimbangan uang. Dan inilah yang menjadi penyebab dari adanya bentuk-bentuk komersialisasi pendidikan yang didukung oleh ekspansi kapitalisme global, yang merambah ke berbagai sendi kehidupan.

3.3 Pendidikan Sebagai Agen Pencipta Manusia Pekerja

Pemahaman tentang pendidikan sebagai agen dalam menciptakan manusia-manusia pekerja akan mudah dipahami dengan menjelaskan terlebih dahulu basis dari argumentasi Karl Marx. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Marx bahwasanya kelas-kelas sosial yang terlahir di masyarakat secara implikasi sosiologisnya akan melahirkan bentuk-bentuk alienasi yang menurut Marx sebagai bentuk dari pengalaman hidup ketika seseorang mengalami dirinya sebagai sosok yang terasing di lingkungannya sendiri, demikian juga bentuk alienasi ini akan berlaku demikian pada aspek pendidikan. Alienasi dimaksud bahwa seseorang merasa asing dengan dirinya sendiri dan tidak mengalami dirinya sebagai pusat dunianya. Proses alienasi ini juga telah merubah manusia dengan sifatnya sebagai subjek yang kreatif menjadi objek yang pasif dalam proses sosial. Proses alienasi pada masyarakat kapitalis terjadi karena para pekerja tidak memiliki keinginan sendiri akan tetapi karena mereka menjual tenaga untuk dipekerjakan, namun tidak dapat mengklaim sebagai produk yang dihasilkan oleh pekerja tersebut, namun tercatat sebagai milik dari kaum kapitalis (Schaht, 2005).

Karl Marx menyebutkan bahwasanya terdapat empat dasar yang menjadi basis argumen dari alienasi yakni *pertama*, para pekerja di dalam masyarakat kapitalis menjadi teralienasi dari aktivitas produksinya. Hal ini dimaksudkan bahwasanya para pekerja tidak bekerja sesuai dengan tujuannya sebagai manusia yang bekerja serta mendapatkan produksi yang berguna untuk mereka. Akan tetapi aktivitas produktifnya hanya berguna bagi kaum kapitalis. Oleh karenanya, kaum borjuislah yang menentukan kepada kaum buruh terkait dengan pekerjaan apa yang akan mereka lakukan dan hasilnya secara keseluruhan telah menjadi hak milik dari kaum

kapitalis. Kemudian yang *kedua*, adalah teralienasi dari produk. Artinya, kepentingan kapitalis benar-benar dipisahkan dengan para buruhnya. Apabila seorang buruh telah bekerja pada majikannya, maka mereka tetap untuk membayar atas produk yang diproduksinya, karena produk merupakan hak milik dari para kapitalis.

Kemudian yang *ketiga* juga seorang pekerja akan mengalami alienasi dari sesama pekerja. Artinya, kapitalisme akan melarang para pekerja untuk saling bekerjasama dengan pekerja yang lainnya, sehingga mereka tidak saling kenal sekalipun berada pada tempat yang berdampingan, kapitalis mengadu para pekerja sejauh mana mereka mampu memproduksi. Situasi yang demikian tentunya akan melahirkan permusuhan di kalangan pekerja, dan hal ini tentunya akan menguntungkan pihak kapitalis karena para pekerja akan kembali pada majikannya dan secara otomatis keuntungan akan kembali pada kaum kapitalis. Dan yang terakhir adalah teralienasinya seorang pekerja dengan potensi kemanusiaan mereka sendiri, artinya seorang pekerja akan dikontrol secara ketat yang berhubungan dengan manusia lain dan juga alam, sehingga potensi mereka akan menjadi terpuruk (Schaht, 2005).

Bentuk alienasi yang dijelaskan oleh Marx dalam kaitannya dengan para pekerja atau seorang buruh juga dirasakan dalam dunia pendidikan. Fenomena alienasi yang terjadi dalam dunia pendidikan juga agakya tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Marx dalam dunia industrial yakni *pertama* anak didik juga merasakan teralienasi dari aktivitas pembelajaran, dalam artian seringkali anak didik tidak menyukai sebagian dari materi pelajaran, namun anak didik merasa tidak berdaya karena tidak memiliki kemampuan untuk tidak memilihnya. Oleh karenanya, ketika anak didik telah menyetujui untuk mengikuti pendidikan formal pada satu jenjang tertentu, maka anak didik tersebut secara otomatis telah dianggap menyetujui semua rangkaian dari proses yang harus dilaluinya.

Kemudian yang *kedua* adalah anak didik juga akan mengalami alienasi dengan sesama peserta didik. Artinya, sedari awal anak didik telah ditanamkan *mindset* untuk saling berkompetisi dalam pendidikan, bahkan *mindset* ini telah dibekali oleh orang tua agar mendapatkan peringkat (ranking) di sekolah. Hal yang terjadi di sekolah adalah seorang guru memberikan kompetisi agar siswa dapat nilai atau ranking yang bagus. Kompetisi yang ketat baik itu di antara teman dalam satu kelas, satu sekolah, akan lebih banyak menyebabkan identifikasi siswa lain sebagai rival, bukan sebagai mitra dalam belajar. Sehingga konsekuensinya adalah akan terlahir anak didik yang memiliki jiwa pesaing atau egoisme yang tinggi (Shodiq, 2018).

Selanjutnya anak didik juga mengalami bentuk alienasi dari potensi yang mereka miliki. Dalam hal ini, seorang pendidik sebagai subjek sedangkan anak didik sebagai objek dalam pembelajaran. Guru mengajar, sedangkan siswa menerima apa saja yang diajarkan oleh gurunya. Proses pembelajaran yang seperti inilah yang akan menghambat tumbuh dan berkembangnya potensi-potensi yang dimiliki oleh anak didik, daya kreativitas dari anak didik juga akan terhambat karena kurangnya ruang eksplorasi bagi setiap anak didik. Anak didik hanya cenderung mengikuti alur yang

ditetapkan dalam sistem pendidikan serta gagal dalam menjadi subjek yang kreatif dalam memproduksi ilmu. Ditambah lagi dengan adanya standar dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dicapai oleh anak didik dalam jangka waktu tertentu yang justru akan menyebabkan anak didik semakin teralienasi dari potensi yang dimilikinya. Karena seorang guru hanya memikirkan target utamanya dalam menyelesaikan semua beban mengajar dalam waktu yang ditentukan dengan nilai minimal yang juga ditentukan. Sedangkan seorang anak didik harus memposisikan dirinya sebagai “mesin” penjawab soal, dengan berbagai standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, Marx dengan tegas mengatakan bahwasanya lembaga pendidikan formal yang diyakini oleh masyarakat sebagai satu-satunya lembaga pendidikan yang berperan dalam mencerdaskan anak didik tidak ubahnya seperti peran-peran kapitalis pada dunia industri. Artinya, dalam pendidikan, anak didik hanya dibentuk sebagai seorang yang siap pakai. Oleh karena, seluruh potensi alamiah dari anak didik yang seharusnya ditumbuh kembangkan dengan baik akan terabaikan. Lembaga pendidikan hanya tunduk pada dunia industri, sehingga Marx menyebut sekolah hanyalah perpanjangan tangan untuk melatih anak-anak yang siap bekerja. Sekolah dalam konteks ini akan menjadi gagal sebagai tempat “produksi ilmu”, lantaran sekolah dijadikan sebagai tempat melatih anak didik yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Dalam hal ini juga akan menjadi sesuatu yang tidak asing lagi apabila di dalam proses perancangan kurikulum dalam pendidikan selalu diorientasikan pada kebutuhan keterampilan yang memiliki relevansi yang kuat pada kebutuhan pasar (industri).

Keinginan dalam memproduksi para pekerja yang dicetak di dalam pendidikan formal menjadi sasaran kritik dari Marx. Karena lembaga pendidikan formal hanya membentuk anak didik yang memiliki budaya kepatuhan, dan sangat jarang dalam pendidikan yang mengorientasikan pada pengaktifan kesadaran terkait dengan pengembangan potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak didik. Budaya untuk mengaktifkan imajinasi dan berpikir kritis pada anak didik menjadi sesuatu yang tidak demikian penting. Oleh karenanya Marx sangat menginginkan bahwasanya kurikulum pendidikan hendaknya mendesain dua prinsip yakni “pendidikan yang sifatnya untuk mengasah mental” dan juga “pendidikan fisik”. Dua hal ini yang menjadi basis utama di dalam mendidik anak. Setelah itu, dilanjutkan dengan “pendidikan teknik” yang disesuaikan dengan kompetensi dari anak didik, dan bukan dirancang tanpa dasar kepentingan dari anak didik (Small, 1982).

Selain itu, Marx sangat tidak setuju apabila di dalam tubuh pendidikan terdapat kelas-kelas sosial yang cenderung tidak egaliter dan deskriminatif. Karena selama ini, Marx merasakan bahwasanya kelas-kelas sosial yang dibentuk di dalam lembaga pendidikan senantiasa juga berperan untuk melanggengkan sistem-sistem kerja pada industri. Artinya, apabila seseorang hanya mengenyam pendidikan yang masuk dalam kategori kelas menengah ke bawah, maka lapangan kerja yang dimilikinya juga tidak jauh dari latar belakang pendidikannya seperti menjadi pekerja

kasar (buruh), namun apabila seseorang telah memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, maka telah dianggap memiliki kompetensi yang lebih dalam menguasai bidang ilmu, serta akan memperoleh bidang kerja yang mumpuni juga. Oleh karenanya, bagi Marx orang yang miskin tidak akan mampu untuk mengakses pekerjaan yang layak, lantaran seseorang yang miskin tersebut tidak dapat mengakses pendidikan yang layak dan tinggi. Sehingga, pendidikan yang layak akan menjadi lahannya bagi para pemilik modal serta pekerjaan yang layak pun akan dikuasai oleh kaum kapitalis.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya lembaga pendidikan yang dikritik oleh Karl Marx lantaran sekolah telah terlanjur menciptakan kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Sekolah juga menjadi barang mahal yang sulit diakses oleh kaum-kaum buruh ataupun pada masyarakat menengah ke bawah, sehingga sekolah menjadi barang elit yang hanya dapat diakses oleh kaum kapitalis. Demikian juga, sekolah telah dijadikan standar bagi manusia untuk mengakses pekerjaan, artinya, ketika seseorang hendak mencari kerja yang diinginkannya harus memiliki syarat-syarat kualifikasi pendidikan. Sehingga, dari hal tersebut akan mengabaikan segudang keterampilan hanya dengan satu lembar ijazah. Selain itu, Marx juga mengkritik lembaga pendidikan hanya melahirkan calon-calon pekerja yang telah siap untuk diterjunkan pada dunia industri. Oleh karenanya, sekolah hanya menjadi wadah untuk melatih manusia-manusia muda agar siap dan tunduk pada kaum kapitalis, sehingga muatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah selalu berkaitan dengan kebutuhan dari pasar kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Allman, P. (2001). *Critical Education Against Global Capitalism: Karl Marx and Revolutionary Critical Education*. Westport, Connecticut: Bergin & Garvey.
- Bahari, Y. (2010). Karl Marx: Sekelumit tentang Hidup dan Pemikirannya. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 1(1), 1-10.
- Bakker, A., & Zubair, A. C. (2007). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Freire, P. (1984). *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*. Diterjemahkan oleh Alois A. Nugroho. Jakarta: PT Gramedia.
- Freire, P. (2001). *Pendidikan yang Membebaskan*. Diterjemahkan oleh Martin Eran. Jakarta Timur: Melibas (Media Lintas Batas).
- Illich, I. (1971). *Bebaskan Masyarakat Dari Belenggu Sekolah*. Terjemahan Deschooling Society. Diterjemahkan Oleh A Sony Keraf. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jalaluddin, & Idi, A. (2002). *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Santo, J. De. (2008). *Pengalaman dan Pendidikan*. Terjemahan dari *Experience and Education John Dewey*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Schaht, R. (2005). *Alienasi: Pengantar Paling Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.

- Shodiq, M. J. (2018). *Analisis Alienasi Siswa dalam Sekolah Menurut Karl Marx (Studi Kasus SD Kemala Bhayangkari 9, Surabaya)*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Siswadi, G. A. (2022a). Pemikiran Filosofis Paulo Freire Terhadap Persoalan Pendidikan dan Relevansinya dengan Sistem Merdeka Belajar di Indonesia. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 9(2), 142-153.
- Siswadi, G. A. (2022b). Pendidikan yang Membebaskan dalam Pandangan Ivan Illich: Suatu Kritik Terhadap Sistem Dehumanisasi dalam Pendidikan. *Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru*.
- Siswadi, G. A. (2023a). Kritik John Holt Terhadap Lembaga Sekolah dan Kontibusi Pemikirannya dalam Redefinisi Makna Pendidikan. *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya*, 6(2), 141-153.
- Siswadi, G. A. (2023b). *Merayakan Kemerdekaan dalam Belajar*. Badung: Nilacakra.
- Siswadi, G. A. (2023c). Ragam Persoalan Pendidikan di Indonesia dalam Tinjauan Kritis Filsafat Pendidikan. *Vidya Darsan: Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu*, 5(1), 20-36.
- Siswadi, G. A. (2024a). Dekonstruksi Sistem Pendidikan Formal dan Masyarakat Tanpa Sekolah dalam Pandangan Ivan Illich. *Jawa Dwipa*, 5(1), 88-105.
- Siswadi, G. A. (2024b). Paradigma Pendidikan Kritis Paulo Freire dan Relevansinya dalam Pengembangan Pendidikan Humanis di Indonesia. *Japam (Jurnal Pendidikan Agama)*, 4(2), 176-187.
- Siswadi, G. A. (2024c). Pedagogi Eksistensial Humanistik dalam Pandangan Jean Paul Sartre dan Refleksi atas Kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia. *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama dan Budaya Hindu*, 15(1), 57-77.
- Small, R. (1982). Work, Play and School in Marx's Views on Education. In *Source: The Journal of Educational Thought* (Vol. 16, Issue 3).
- Topan, M. (2021). Pragmatisme dalam Pendidikan di Indonesia: Kritik dan Relevansinya. *Al-Idrak: Jurnal Pendidikan Islam Dan Budaya*, 1(1), 16-26.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional.